ANALISIS *DYNAMIC GOVERNANCE* PADA PELAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

SELVI HILIMI
NIM. D02419013

FAKULTAS ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2023

ANALISIS *DYNAMIC GOVERNANCE* PADA PELAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GORONTALO

Selvi Hilimi[1], Apris Ara Tilome[2], Widya Kurniati Mohi[3]

[123)]Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2023

Email: selvihilimi17@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to determine the results of Dynamic Governance Analysis on education services in Gorontalo Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the concept of dynamic governance has yet to be achieved. Due to the need for better coordination between the government and the community, it does not align with achieving the government's goals. Many obstacles in its implementation should be studied more deeply, lack of program support budget and a lack of interest of teachers and students to develop. So, the government in the field of education in Gorontalo Regency is not yet dynamic.

Keywords: Analysis; Dynamic governance; Thinking ahead; thinking again; and thinking across

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Hasil Analisis *Dynamic Governance* pada pelayanan pendidikan di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa konsep *dynamic governance* ini belum tercapai. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak sejalan dengan capain tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, ada banyak kendala dalam pelaksanaanya yang tidak dikaji lebih dalam lagi, Kurangnya anggaran penunjang program, Serta kurangnya minat guru dan siswa untuk berkembang. Sehingga dapat dapat di tarik kesimpulan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Gorontalo belum dinamis.

Kata kunci : Analisis; *Dynamic Governance; Thingking Ahead; Thingking Again; and Thingking Acros*

PENDAHULUAN

Kondisi *good governance* saat ini benar-benar belum berjalan sesuai yang di rencanakan. Karna pada dasarnya ide *good governance* ini dicetuskan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif demi menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Indonesia membutuhkan pemerintahan yang nmampu berpikir kedepan dan antisipatif. Pemimpin yang betul-betul mampu mengkaji strategi, kebijakan dan program yang di keluarkan, dan pemimpin yang mampu berpikir secara lateral,

horizontal serta lintas disiplin. Namun yang terjadi saat ini adalah masih kurangnya koordinasi dari pihak pemerintah dan masyarakat dan tingkat kepedulian dari semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang terkait. Sehingga tujuan dari *good governance* ini masi sulit di capai.

G.H Addink dan Budisetyowati (2003) mengatakan bahwa konsep *good governance* dalam konteks pemerintahan adalah dalam rangka interaksi suatu Pemerintah dan bangsanya. Oleh karenanya, *Good governance* merepresentasikan beberapa hal, seperti antara lain:

1. Hak-hak fundamental,
2. Efektifitas dan transparansi,
3. Akuntabilitas pemerintah (dalam hal masalah keuangan , Dll), dan
4. Pengembangan aturan hukum (*rule of law*).

Government adalah salah satu aktor dalam *governance*. Aktor- aktor lain yang terlibat dalam *governance* bermacam-macam bergantung pada level *government* yang didiskusikan. Didalam pemerintahan yang *governance* maka terjadilah atau dituntut adanya sinergi di antara ke tiga aktor yang ada, yaitu :

1. Pemerintah itu sendiri (*Public*),
2. Masyarakat (*community atau civil society*/masyarakat madani), dan
3. Pihak swasta (*private*).

Istilah *governance* telah lama kita kenal yaitu menunjuk pada hubungan antara pemerintah/negara dengan warganya sehingga memungkinkan berbagai kebijakan dan program dapat dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi.

konsep operasional dari *Governance* (kepemerintahan) adalah “cara yang ditempuh pemerintah suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan bagi pencapaian tujuan negara”. Dalam kaitannya dengan cara menjalankan roda pemerintahan, di samping kita mengenal adanya azas-azas penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dalam *good governance* (disebut *good governance* karena pemerintah melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan), Bank Dunia (dalam *World Bank Economics Review*, 2002) juga merekomendasikan perlunya memperhatikan 6 (enam) dimensi dari *governance* yaitu:

1. Kebebasan dan akuntabilitas – perluasan peran serta masyarakat dalam memilih penyelenggara pemerintahan, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan pers.
2. Stabilitas politik dan tidak ada lagi kekerasan – tidak ada lagi pergantian pemerintahan lewat kekerasan, secara tidak konstitusional dan memerangi terorisme.
3. Pemerintahan yang efektif – pelayanan publik yang berkualitas oleh aparatur pemerintah yang bebas dari tekanan politik, komitmen pemerintah untuk membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan yang berkualitas.
4. Aturan perundang-undangan yang berkualitas – kemampuan pemerintah untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan (perundang-undangan) yang mendorong peran swasta dalam pembangunan.
5. Penegakan hukum – meyakinkan berbagai pihak bahwa aturan hukum akan dipatuhi, terutama keberlangsungan kontrak-kontrak yang telah disepakati, demikian juga polisi, jaksa dapat menegakkan hukum secara adil.
6. Pengendalian atau penghapusan korupsi – Sedang konsep

operasional dari *Dynamic Governance* adalah ”kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai”.

Konsep *dynamic governace* sebenarnya merupakan konsep turunan dari *good governance.* Tapi yang membedakan *dynamic governance* ini adalah metode yang di gunakan yakni tata kelola pemerintahan hanya menggunakan tiga indikator yaitu *thinking ahead, thinking again, and thinking across.* Yang agak sedikit berbeda dari prinsip *good governace* yang berfokus pada pemerintahan yang *akuntabilitas*, partisipasi, *transparansi, responsif*, supremasi hukum, konsensus, keserataan dan keadilan, efektif dan efisien dan strategi.

Dynamic governance merupakan suatu konsep untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu pemerintahan/organisasi agar tetap hidup (*survive*) menghadapi perubahan global yang cepat dan tidak menentu. Organisasi pemerintah/organisasi lainnya tidak boleh statis, keberhasilan kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan atau masa lampau tidak menjamin kesuksesan masa depan. Oleh karena yang telah dijelaskan oleh Boon dan Geraldine (2007) menurutnya diperlukan semangat/dinamika untuk selalu menyesuaikan kebijakan, strategi, dan program dengan perkembangan masa depan melalui *thinking ahead, thinking again*, *and thinking across.*

Thinking Ahead merupakan kemampuan mengidentifikasi faktor lingkungan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang, memahami dampaknya terhadap sosio-ekonomi masyarakat, mengidentifikasi pilihan-pilihan investasi yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan kesempatan baru dan menghindari potensi ancaman yang dapat menghambat kemajuan masyarakat. Berfikir ke depan ini akan mendorong institusi pemerintah untuk menilai dan meninjau kembali kebijakan dan strategi sedang berjalan, memperbaharui target dan tujuan, dan menyusun konsep baru kebijakan yang dipersiapkan menyongsong masa depan.

Thinking again merupakan kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan. Apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi, dan program telah memenuhi harapan banyak pihak atau perlu didisain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik. Kaji ulang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah terjadi mencakup pemanfaatan data, informasi-informasi baru, ukuran/standar yg telah ditentukan, warisan masalah dari suatu kebijakan atau program, dan umpan balik yang diterima.

Thinking across merupakan kemampuan untuk mengadopsi pikiran, pendapat, ide-ide lain di luar kerangka berpikir *(mindset)* yang secara tradisional telah melekat dan menjadi dasar melakukan sesuatu. Dengan belajar dari pengalaman dan pemikiran orang lain dalam mengelola sebuah negara atau pemerintahan akan didapat ide-ide dan pemikiran segar dalam melakukan inovasi bagi perbaikan kebijakan, strategi, dan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan

adanya masalah 1) Pemerintah belum optimal dalam mengidentifikasi faktor lingkungan pendidikan sehingga masi kurangnya SDM baik kualitas maupun kuantitas. 2) Pemerintah belum optimal menerapkan strategi, dalam peninjauan kembali kebijakan yang telah di keluarkan, seperti kurikulum lama belum benar-benar berjalan tapi sudah diadakan pergantian kurikulum. 3) Pemerintah belum optimal mengadopsi ide-ide dari luar negeri seperti waktu belajar yang singkat dan fasilitas yang memadai dalam menunjang kenyaman proses belajar-mengajar.

Penelitian ini melibatkan beberapa sumber penelitian terdahulu yang digunakan sebagai reverensi bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

Penalitian terdahulu yang pertama, dengan judul Tinjauan *Dynamic Governance* dalam mendukung perkembangan perkampungan budaya betawi (PBB) seatu babakan menuju wisata halal atas nama Hisyam Yusril Hidayat, Davis Malchiel Ravanelli pada tahun 2019 dengan tujuan penelitian menganalisis prospek implementasi tata pemerintahan yang dinamis dalam hal pembangunan PBB seatu babakan sebagai wisata alam berbasis kearifan lokal dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan ditemukan hasil penelitian menunjukan bahwa *Dynamic capabilities* membantu dalam proses pengembangan. Kedua, penelitian terdahulu dengan judul penerapan *dynamic governace* di Kecamatan Mariso atas nama Muhammad Akbar pada tahun 2018 bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *dynamic governance* di Kecamatan Mariso kota Makasar, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan ditemukan hasil penelitian menunjukan bahwa 1. Penerapan *Dynamic Governance* di Kecamatan Mariso Kota Makassar, *Thinking Ahead,* Mengubah Kecamatan Mariso menjadi lebih baik seperti melalui visi-misinya pemerintah kota yang ingin mewujudkan Kecamatan Mariso kota makassar sebagai kota impian yang nyaman untuk semua masyarakatnya, Mampu menyusaikan diri demi tercapainya tujuan seperti penerapan Smart city, dan lain-lain.*Thinking Again,* Menetukan visi-misi di perlukan satuan perangkat daerah (SKPD). Kemampuan mengevaluasi kebijakan seperti melakukan kunjungan kesetiap kecamatan untuk memantau kebijakan yang sedang berlangsung. Meninjau kembali kebijakan dan program inovasi oleh pemerintah. Faktor yang mempengaruhi Penerapan *Dinamic Governance* Di Kecamatan Mariso Kota Makassar. SDM yaitu satuan perangkat daerah, Kurangnya partisipasi dalam menjalankan setiap program-program inovasi pemerintah. Ketiga, penelitian dengan judul Dialektika Konsep *Dynamic Governance* atas nama Mudiyati Rahmatunnisa pada tahun 2010 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan didapatkan hasil yang menunjukan bahwa Pemerintahan yang dinamis (*dynamic governance)* menjadi sebuah kapabilitas yang strategis yang perlu dimiliki oleh Pemerintah di berbagai Negara di dunia saat ini. Perubahan berbagai sektor dan aspek kehidupan pada akhirnya melahirkan berbagai tuntutan kepada pemerintah untuk dapat meresponnya secara lebih efektif dan efisien.

Berbeda dengan penelitian terdahulu peneliti lebih memfokuskan pada analisis *dynamic governace* pada pelayanan pendidikan di Kabupaten Gorontalo. Jika penelitian terdahulu membahas *dynamic governance* dalam pembangunan tempat wisata dan pembangunan kota maka penlitian ini lebih melihat kedinamisan pemerintah Kabupabaten Gorontalo dalam pelayanan pendidikan, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Karena hal ini dianggap yang paling relevan dengan alur penelitain dan memudahkan peneliti dalam menyajikan data.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif karena ingin mengungkap sebuah fenomena atau permasalahan tertentu secara mendalam. Fenomena yang dimaksud adalah bagaimana Hasil Analisis *Dynamic Governance* Pada Pelayanan Pendidikan Di Kabupaten Gorontalo.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, sedangkan yang menjadi sumber data adalah para informan. Sedangkan dalam proses analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Untuk memperoleh keabsahan hal penting dilakukan dengan proses penelitian supaya temuan hasil penelitian yang dapat dipercaya atau diakui validitas dan reabilitasnya. Hasil penelitian ini dapat diakui validitasnya jika didapatkan dari data-data yang valid juga. Untuk memperoleh keabsahan data atau uji coba kredibilitas informasi dapat dilakukan dengan cara triangulasi, member chek, pengamatan dengan cerrmat, diskusi-diskusi dengan yang dianggap ahli dan memahami permasalahan, perpanjang waktu penelitian serta pengecekan kebenaran dan kecocokan atas hasil interprestasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi gorontalo pusat pemerintahan daerah Kabupaten ini terletak di kota limboto. Sejak di tetapkan sebagai Kabupaten pada tahun 1959 hingga sekarang, yang memiliki 19 Kecamatan yaitu Kecamatan Asparaga, Dungaliyo, Batudaa, Batuda Pantai, Bilato, Biluhu, Boliyohuto, Bongomeme, Limboto, Limboto Barat, Mootilango, Pulubala, Tabongo, Telaga, Telaga biru, Telaga jaya, Tibawa, Tilango, dan Tolangohula, dan memiliki beberapa kantor instansi pemerintahan lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) yang mengelola sektor pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Dengan telah diundangkannya Peraturan Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Gorontalo didapati permasalahan seperti kepemerintahan dalam bidang pendidikan yang belum dinamis, dalam hal ini pemerintah belum optimal dalam mengidentifikasi faktor lingkungan pendidikan wilayah Kabupaten Gorontalo sebagaimana

pengantisipasian atas masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang, selain dari pada itu didapati juga bahwa pemerintah masih belum optimal dalam menjalankan strategi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan seperti kesiapan para guru dan siswa terhadap apa yang akan di programkan, dan ketidak optimalan pemerintah dalam menerapkan hasil adopsi ide dari luar. Dan peneliti tertarik membahas masalah ini dengan menggunakan teori dynamic governace yang di kemukakan oleh Boon Siong Neo dan Geraldine Chen pada tahun (2007) mengandung beberapa indikator yaitu *thinking ahead, thinking again and thinking across.*

Thinking Ahead merupakan kemampuan mengidentifikasi faktor lingkungan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang, memahami dampaknya terhadap sosio-ekonomi masyarakat, mengidentifikasi pilihan-pilihan investasi yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan kesempatan baru dan menghindari potensi ancaman yang dapat menghambat kemajuan masyarakat.

Proses berpikir ke depan atau meninjau masa depan ini meliputi :

1. Menggali berbagai kemungkinan dan antisipasi terhadap berbagai kecenderungan masa depan yang memiliki dampak signifikan terhadap tujuan kebijakan;
2. Merasakan dampak pembangunan terhadap pencapaian tujuan pembangunan sedang berjalan, dan menguji efektivitas kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan;
3. Menentukan pilihan-pilihan yang akan digunakan sebagai persiapan menghadapi timbulnya ancaman terhadap peluang yang baru; dan
4. Mempengaruhi para pembuat kebijakan kunci dan para pemangku kepentingan untuk memperhatikan isu-isu yang muncul secara serius dan mengajak mereka untuk membicarakan kemungkinan respon/tanggapan yang akan diambil.

Namun pada kenyaantaannya proses identifikasi ini belum optimal diterapkan dalam proses membangun pelayanan yang baik untuk bidang pendidikan di Kabupaten Gorontalo. *Thinking ahead* (berpikir kedepan) ini penerapannya belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dari dua pihak terkait yang mengatakan bahwa proses mengidentifikasi masalah-masalah yang akan mempengaruhi masa depan belum optimal atau proses antisipasi hal-hal yang mempengaruhi masa depan belumlah berjalan sebagaimana mestinya. Belum ada koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan dan penerima kebijakan, sehingga terjadi *mis*sed antara tujuan yang ingin di capai oleh pemerintah dengan fakta yang teradi di lapangan. Terlihat belum ada kesiapan dari masyarakat akademik, dan juga masih kurangnya fasilitas penunjang seperti *smartphone* yang mumpuni dan koneksi internet yang stabil. Dalam hal ini bisa dilihat belum ada pemerataan pembangunan untuk semua wilayah akan tetapi semua wilayah harus mengikuti kebijakan yang sama. Kebutuhan masyarakat dan tuntutan dari pemerintah juga semakin lama semakin banyak, jika pemerintah tidak cepat, responsif dan efisien dalam mengelola semuanya kepemerintahanya maka tidak heran jika yang terjadi *bad governance* dan bukan *good governance.*

Thinking again merupakan kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan. Apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi, dan program telah memenuhi harapan banyak pihak atau perlu didisain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik. Kerangka waktu melakukan kaji ulang mulai dari kondisi yang sekarang dihadapi sampai masa waktu berlakunya kebijakan, strategi, dan program, dengan membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang diinginkan. Kaji ulang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah terjadi mencakup pemanfaatan data, informasi-informasi baru, ukuran/standar yg telah ditentukan, warisan masalah dari suatu kebijakan atau program, dan umpan balik yang diterima.

Kaji ulang dimaksudkan untuk melihat kelayakan dan kecocokan kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan dengan kondisi sedang dihadapi dan masa mendatang akibat perubahan lingkungan global yang cepat.

Proses memikirkan kembali / kaji ulang meliputi:

1. Menganalisis dan meninjau kinerja terakhir berdasarkan umpan balik masyarakat.
2. Mencari penyebab mendasar tercapai atau tidak tercapainya sebuah target;
3. Meninjau kembali kebijakan, strategi, dan program untuk mengidentifikasi faktor-faktor menonjol penyebab keberhasilan dan kegagalan.
4. Mendisain kembali kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya sehingga kinerja dapat diperbaiki dan tujuan tercapai secara lebih baik. dan
5. Menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga masyarakat bisa menikmati pelayanan dan outcome lebih baik.

Namun nyatanya pada kondisi saat ini pada pelayanan pendidikan di Kabupaten Gorontalo untuk Indikator *thinking again* ini belum optimal dalam pelaksanaanya, masih banyak permasalahan tentang program atau kebijakan yang dikeluarkan. Jika pemerintah sudah optimal dalam pemikiran indikator ini, maka dengan sendirinya akan terbangun *public trust.* Dan yang terjadi di lapangan adalah masih banyak publik yang tidak percaya lagi dengan kepemimpinan pemerintah. Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan namun sedikit pengkajiannya. Jika sebuah program di kaji dengan benar-benar, maka akan sejalan juga pembangunan di daerah-daerah, hal ini akan menunjang sebuah keberhasilan dari apa yang sudah menjadi tujuan dari program yang dibuat. Diperlukan tingkat kepedulian yang tinggi dari pemerintah untuk membangun sumber daya manusia serta sektor-sektor penunjang lainya. Agar terkoordinasi dengan baik sehingga menciptakan kualitas hasil yang lebih baik.

Thinking across merupakan kemampuan untuk mengadopsi pikiran, pendapat, ide-ide lain di luar kerangka berpikir *(mindset)* yang secara tradisional telah melekat dan menjadi dasar melakukan sesuatu. Dengan belajar dari pengalaman dan pemikiran orang lain dalam mengelola sebuah negara atau pemerintahan akan didapat ide-ide dan pemikiran segar dalam melakukan inovasi bagi perbaikan kebijakan, strategi, dan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat akademik wilayah Kabupaten Gorontalo. Falsafah dasar dalam *thinking across* ini adalah *present-outside, future-*

inside yang dapat dimaknai saat ini pikiran-pikiran brilian, kebijakan, strategi dan program yang baik-baik masih menjadi milik negara atau organisasi lain tetapi ke depan akan menjadi milik kita. Dengan belajar dari pihak lain bukan sekedar teknis operasional, tetapi lebih penting dari itu adalah menyangkut mengapa pihak lain dapat menyelesaikan masalah yang sama dengan cara berbeda, bagaimana mereka mendisain suatu kebijakan atau program sesuai dengan karakteristik kemajuan masyarakat setempat, dan lain-lain yang bersifat inovatif dan kreatif. Pemerintah kabupaten Gorontalo membutuhkan konsep ini agar tetap eksis dalam membangun pelayanan yang dinamis sesuai zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi ini.

Proses *thinking across* ini meliputi:

1. Mencari dan menemukan praktek-praktek implementasi suatu kegiatan/ program yang kurang lebih sama/ memiliki kemiripan.
2. Refleksikan atau gambarkan tentang apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukan, ambil pelajaran dari pengalaman yang mereka lakukan.
3. Evaluasi apa yang dapat diterapkan pada kontek lokal (tempat kerja, masyarakat setempat/lokal), pertimbangkan hal-hal dan kondisi unik yang mungkin dapat diterima masyarakat lokal.
4. Ungkapkan hubungan antara ide-ide baru atau kombinasikan ide-ide berbeda yang dapat menciptakan pendekatan yang inovatif terhadap isu-isu yang muncul, dan Sesuaikan kebijakan dan program dengan kebutuhan setempat/lokal.
5. Proses berpikir ke depan, berpikir ulang, dan berpikir ke luar dari mindset yang sudah terbentuk merupakan proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Fakta lapangan yang didapati peneliti menunjukan bahwa indikator *thinking across* (kemampuan pemerintah dalam mengadopsi ide dari luar) masih belum dinamis sehingga dapat dikatakan hasil analisisnya belum optimal. Pemerintah belum bias mampu mongoptimalkan hasil adopsi dari luar dengan baik. Hal ini juga dipengaruhi kualitas SDM di Kabupaten Gorontalo masih belum terupgret sempurna. Sehingga sulit menyesuaikan dengan kondisi yang ada di negara luar. Kurangnya minat berkembang dari SDM tenaga pendidik wilayah Kabupaten Gorontalo untuk bisa sama rata kualitasnya dengan tenaga pendidik di luar daerah saja masi sulit apalagi dengan tenaga pendidik luar negeri. ketika lingkungan berubah, tata kelola pemerintahan juga berubah atau diupgrede. Hal ini memerlukan kemampuan pemerintah untuk memperbaharui prinsip, kebijakan, dan praktik-praktiknya yang harus didukung dengan masyarakat yang sudah maju juga. Agar kebijakanyang dikeluarkan oleh pemerintah juga bisa terlaksana dengan baik. Pemerintah harus bisa menguasai konsep ini agar terus belajar dan berinovasi untuk membangun dan membuka ide baru, membangun persepsi-persepsi segar, melakukan aksi cepat dan peningkatan berkelanjutan untuk mencapai adaptasi yang fleksibel dan harus didukung dengan masyarakat yang mau belajar lebih dari apa yang sekeder dalam negeri.

PENUTUP

Dari sejumlah definisi-definisi tentang *Dynamic Governance,* peneliti perlu tergaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori yang dikemukakan oleh Boon Siong Neo, Geraldine Chen (2007) sebagai berikut beserta hasil dari penelitian 1). *Thinking ahead* (pemikiran kedepan) bahwa kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi faktor lingkungan pendidikan masih belum optimal walau dengan upaya-upaya yang dilakukan. Hal ini karena kurangnya koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan dan penerima kebijakan. Sehingga tidak sejalan dengan capaian tujuan dari pembuat kebijakan. Pemerintah sudah berupaya dengan segala program yang dikeluakan, akan tetapi kenyataanya dilapangan masih banyak yang belum siap dalam proses pelaksanaannya. 2). *Thinking again* (pengkajian kembali) bahwa pemerintah belum optimal dalam mengevaluasi strategi atau kebijakan yang sudah dikeluarkan. Hal ini di buktikan dengan rata-rata mengatakan belum optimal karena masih banyak program-program yang belum tercapai dan tidak dilanjutkan karena kekurangan dana dalam pelaksanaanya. Dan untuk indikator ke-3). *Thinking across,* pemerintah belum mengoptimalkan hasil adopsi ide dari luar, hal ini terjadi karena memang kualitas SDM di Kabupaten Gorontalo masih belum terupgret sempurna. Sehingga sulit menyesuaikan dengan kondisi yang ada di negara luar. Kurangnya minat berkembang dari sebagian SDM tenaga pendidik wilayah Kabupaten Gorontalo karena banyak guru yang kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan zaman yang sudah penuh dengan kecanggihan teknologi.

Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi faktor lingkungan pendidikan agar bisa meminimalisir permasalahan masa depan, Pemerintah harus mampu mengelola strategi, kebijakan atau program yang sebelum dan sesudah dikeluarkan dengan teliti. Dan pemerintah harus mampu mengadopsi pemikiran dari luar, mampu memberikan pendangan baru dari pendekatan yang telah dicoba oleh organisasi lain

DAFTAR PUSTAKA

G. H Addink, (2003), *From principles of proper administrationto principles of good governance,* diklat good governance.

Sedarmayanti, (2007), *Prinsip-prinsip good governance*

Word bank (2002), Azaz-azaz *good governance.*

Boon Siong Neo, Geraldine Chen. 2007. *Dynamic Governance, Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore. World Scientific Publishing Co*. Pte. Ltd

Kaufmann Daniel, Aart Kraay, dan Massimo Mastruzzi, (2004). *Governance Matters III;*

Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono (2018), Metode analisis data. Bandung: Alfabeta

Moelong, L (2011). Motodologi Penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung. Remaja Rosdaya.

Mudiyati Rahmatunnisa (2010). Dialektika konsep *dynamic governance*

Muhammad akbar, (2019). Penerapan *dynamic*

governance di kecamatan mariso Kota Makassar

Hisyam Yusril Hidayat, Dyah Ayu Febriani, Davis Malchiel Ravanelli, (2019). Tinjauan *Dynamic Governance* Dalam Mendukung Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi (Pbb) Setu Babakan Menuju Wisata Halal.

Neo, B. S, (2019). *Dynamic Governance*. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org

Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic governance*: embedding culture, capabilities and change in Singapore. New Jersey: World Scientific.